

9

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI



**NAMA : SRI KURNIA
NIM : 222012057**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALEMBANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**NAMA : SRI KURNIA
NIM : 222012057**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Kurnia
NIM : 22 2012 057
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah dibuat dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

2016

Penulis,



Sri Kurnia

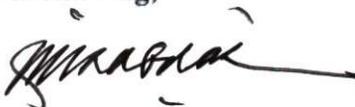
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan
Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Nama : Sri Kurnia
NIM : 22 2012 057
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

Pembimbing,



Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0206047101/859196

Mengetahui
Dekan

u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

- ❖ *Banyak kegagalan dalam hidup dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.*
- ❖ *Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari ALLAH dan aku percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah Ia tetapkan.*

(Sri Kurnia)

Terucap syukur pada-Mu Allah SWT

Ku persembahkan untuk :

- ❖ *Kedua orangtuaku tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaikku*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Almamaterku*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtuaku Bapak Abdullah Sulaiman dan Ibu Suhainar Ishak, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari mereka, serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Mizan S.E., M.Si., Ak., CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus

dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi akuntansi dan Bapak Mizan S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga selaku pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan saran, nasehat, dan pengetahuan baru dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak H. M Basyaruddin R, S.E.,Ak.,M.Si.,CA., selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan Seluruh Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan seluruh staff Hotel Sentosa Palembang, terima kasih atas do'a, nasihat, dan dukungan moriil yang diberikan.

8. Saleh Alkabiir, A.md terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama pembuatan sampai skripsi ini selesai.
9. Sahabat-sahabatku di Fakultas Ekonomi (Indrastin Anggraini, Nurul Atika, Ayu Noprin Pratiwi dan Amalia Mufidah) serta seluruh teman-teman angkatan 2012.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang,.....2016

Penulis

(Sri Kurnia)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	6
B. Landasan Teori.....	8

1. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	8
a. Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan	8
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	8
c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	9
d. Kelebihan dalam Pengukuran Kinerja Keuangan	11
2. <i>Value For Money</i>	15
a. Pengertian <i>Value For Money</i>	11
b. Tujuan <i>Value For Money</i>	12
c. Konsep Pengukuran <i>Value For Money</i>	15
1) Ekonomis	13
2) Efisiensi.....	14
3) Efektivitas	17
4) <i>Outcome</i>	18
3. Anggaran.....	18
a. Pengertian Anggaran.....	18
b. Fungsi Anggaran Sektor Publik	19
c. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	19
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..	20
1) Definisi APBD	20
2) Fungsi APBD	20
3) Unsur-Unsur APBD	24

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Operasionalisasi Variabel.....	27
D. Data yang Diperlukan	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian	32
2. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	32
3. Visi & Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.....	33
4. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas	34
B. Pembahasan	52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN	66
B. SARAN	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	69
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	3
Tabel I. 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	3
Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel	27
TabelIV.I	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	51
Tabel IV.2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	52
TabelIV.3	Pengukuran Rasio Ekonomis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	55
TabelIV.4	Pengukuran Rasio Ekonomis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	57
TabelIV.5	Pengukuran Rasio Ekonomis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	61
Tabel IV.6	Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	StrukturOrganisasi	36
-------------	--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 2	Fotocopy Sertifikat KKN
Lampiran 3	Fotocopy sertifikat Toefl
Lampiran 4	Fotocopy Sertifikat Hapalan AIK
Lampiran 5	Fotocopy Aktifitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Biodata Penulis

ABSTRAK

Sri Kurnia / 222012057 / 2016 / Akuntansi Sektor Publik/ Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah analisis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Tujuan untuk mengetahui analisis pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Penelitian ini jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis ata yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang jika dilihat dari tingkat ekonomis tahun anggaran 2012-2015 mengalami fluktuasi dan dikategorikan ekonomis dan cukup ekonomis, dikarenakan tingkat rasio ekonomis berada diantara 80%-90%. Ditinjau dari tingkat efisiensi tahun anggaran 2012-2015 dikategorikan kurang efisien dan tidak efisien, dikarenakan rasio efisiensi antara 90%-100%. Ditinjau dari tingkat efektivitas tahun anggaran 2012 dikategorikan sangat efektif dikarenakan rasio efektivitas lebih dari 100% dan pada tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan efektif karena rasio efektivitas diatas 90%.

Kata kunci: *value for money, ekonomis, efisiensi, efektivitas, outcome*

ABSTRACT

Sri Kurnia/222012057/The Analysis of Financial Value For Money Method to Measure Regional Financial Performance at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang/Public Sector Accounting

The formulation of the problem how the analysis of financial value for money method to measure regional financial performance at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. The purpose of the study is to examine the financial performance measurement analysis using Value For Money Method at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

This research is a descriptive study. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using documentation and interviews. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

The results showed that financial performance at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang if viewed in terms of the economic year 2012-2015 budget fluctuations in an economical categorized quite economical, because the level of economic ratios are among 80%-90%, in terms of the level of efficiency of the fiscal year 2012-2015 categorized as less efficient and inefficient due to the efficiency ratio between 90 % -100 %. In terms of the effectiveness of fiscal year 2012 is categorized as very effective due to the effectiveness ratio of more than 100 % and in fiscal year 2013-2015 considered effective for effectiveness ratio above 90 %.

Keywords : *value for money, economy, efficiency, effectiveness, outcome*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana, dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD.

Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *value for money*.

Value For Money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2009:145).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan dan aset daerah, kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Palembang di bawah ini :

Tabel I. 1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2015

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2012	2.138.560.386.304,75	2.240.761.644.433,74	104,78
2013	2.653.312.493.324,70	2.510.646.255.478,88	94,62
2014	3.082.206.627.931,31	2.929.034.491.604,27	95,3
2015	2.859.503.907.463,85	2.703.544.351.937,46	94,54

Sumber : BPKAD Kota Palembang, 2016

Tabel I. 2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2012-2015

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2012	2.289.049.724.638,86	2.112.638.103.434,82	92,39
2013	2.858.692.130.178,64	2.636.707.559.383,33	92,23
2014	3.153.733.368.049,39	2.812.465.373.360,45	89,19
2015	3.136.935.520.278,17	2.869.893.611.887,60	91,49

Sumber : BPKAD Kota Palembang, 2016

Berdasarkan tabel I. 1 dan I. 2 dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yaitu pendapatan pada tahun 2012 terealisasi sebesar 104,78% melebihi dari target yang dianggarkan, dan belanja terealisasi sebesar 92,39 %. Realisasi pendapatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu terealisasi sebesar 94,62% sedangkan belanja sebesar 92,23%. Selanjutnya di tahun 2014 realisasi pendapatan meningkat sebesar 95,3% sedangkan belanja mengalami penurunan sebesar 89,19% dari yang dianggarkan, dan realisasi di tahun 2015

kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 94,54% sedangkan belanja mengalami peningkatan yaitu sebesar 91,49%.

Laporan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya menunjukkan kenaikan dan mengalami penurunan di tahun 2015, sedangkan belanja daerah terus meningkat setiap tahunnya tetapi kenaikan pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja sehingga menimbulkan defisit anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 126.061.303.904,5 dan pada tahun 2015 kembali terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 166.349.259.950. Untuk tahun 2012 dan 2014 dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah masih dibawah total anggaran yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimanakah kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

b. Bagi Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nazril (2013) dengan judul Penerapan Konsep *Value For Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menerapkan konsep *value for money* sebagai alat pengukuran kinerja. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar telah memenuhi prinsip *Value For Money* yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengukur kinerja dengan metode *Value For Money*. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar sedangkan penulis menilai kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Brian (2013) dengan judul Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa gambaran umum kabupaten Minahasa Selatan yang diperoleh langsung melalui

wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti, sedangkan data skunder berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007-2011. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi lapangan dan studi dokumentasi. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang diteliti, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa laporan realisasi APBD. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelolah anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan yang didasarkan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan rasio keuangan sedangkan penulis menilai kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money*.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ariel (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Metode pengumpulan data yang digunakan dalm penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Data primer

berupa gambaran umum kabupaten Minahasa Selatan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti, sedangkan data skunder berupa laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan tahun 2008-2012. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode dokumentasi, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa laporan realisasi belanja. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA tahun 2008 sampai dengan 2012 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengukur kinerja keuangan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya mengukur anggaran belanja dan diukur hanya dari segi efektivitas dan efisiensi sedangkan penulis mengukur kinerja keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan menggunakan metode *Value For Money*.

B. Landasan Teori

1) Pengukuran Kinerja Keuangan

a) Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.

Menurut Mulyadi (2009:248) Kinerja Keuangan merupakan manifestasi keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di kinerja operasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Keuangan merupakan manifestasi keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

b) Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2010:35) tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi standar perilaku yang

telah ditetapkan sebelumnya, agar mendapatkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Mahmudi (2010: 14) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu :

- (1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- (2) Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai.
- (3) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- (4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
- (5) Motivasi pegawai.
- (6) Menciptakan akuntabilitas.

c) Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan (Mardiasmo, 2009: 122) adalah :

- (1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- (2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan memandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

- (4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- (5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- (6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- (7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- (8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut :

- (1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
- (2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- (3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

d) Kelebihan dalam Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2010:122) kelebihan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- (1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
- (2) Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- (4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.
- (5) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- (6) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

2) Value For Money

a) Pengertian Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang

terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

b) Tujuan *Value For Money*

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* adalah :

- (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- (2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- (3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- (5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c) Konsep Pengukuran Kinerja *Value For Money*

(1) Ekonomis

Mardiasmo (2009:4) Ekonomis adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga yang rendah. Ekonomis terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Mahmudi (2016: 21) Ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{EKONOMIS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.
- (b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
- (c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis.

- (d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
- (e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis.

(2) Efisiensi

Bastian (2006:77) Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Mardiasmo (2009:4) Efisiensi merupakan perbandingan antara *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Deddi dan ayuningtyas (2010:161) Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- (b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- (c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- (d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- (e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

a) Efisiensi Anggaran Sektor Publik

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bukan lagi diukur oleh besarnya penyerapan anggaran, tapi oleh efisiensi dan penghematan yang dilakukan instansi tanpa mengurangi capaian target kinerja. Setiap aparatur negara didorong untuk menyetop pemborosan dan melakukan penghematan di lingkungan masing-masing, mulai dari penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja, penghematan belanja barang dan belanja jasa, serta penghematan melalui pemanfaatan makanan dan buah-buahan produksi dalam negeri. Seluruh aparatur negara diinstruksikan untuk melakukan penghematan, mulai dari penggunaan listrik, perjalanan dinas, penggunaan produksi lokal, hingga kesederhanaan hidup.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.
- (2) Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti : di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.
- (3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Kementrian PAN RB.

(3) Efektivitas

Indra Bastian (2006:280) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif, sedangkan menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mahmudi (2016: 21) Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomis berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil).

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan.

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}}{\text{TARGET ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- (b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.

- (c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- (d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- (e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

(4) Outcome

Mardiasmo (2009: 4), *Outcome* adalah dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

3) Anggaran

a) Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang. Menurut Mulyadi (2010:24) anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam jangka waktu setahun.

Abdul Halim (2009:172) Anggaran (*budget*) merupakan hasil yang diperoleh setelah tugas perencanaan sedangkan menurut Mahmudi (2016:59) Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam suatu organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai anggaran yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya untuk periode satu tahun.

b) Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2011:63) anggaran sektor publik berfungsi sebagai berikut :

- (1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- (2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
- (3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- (4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
- (5) Anggaran merupakan instrumen publik.
- (6) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

c) Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2011:72) anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- (1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain uang.
- (2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa bulan.
- (3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (4) Usulan anggaran telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari anggaran.
- (5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a) Definisi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran belanja yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

b) Fungsi APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ada enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD yaitu:

(1) Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri mempunyai makna “pemberian kekuasaan”, hal ini jika dikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD. Bagi SKPD yang menganggarkan pendapatan dan telah ditampung dalam APBD, sudah seharusnya mengupayakan seoptimal mungkin untuk merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab SKPD tersebut.

Dengan demikian sumber-sumber pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendanai sisi belanja yang juga telah dianggarkan dalam APBD.

(2) Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan apabila sejak awal telah direncanakan maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika APBD telah ditetapkan, menjadi kewajiban setiap penggunaan anggaran untuk membuat

anggaran kas agar kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam hal ini tentu saja dengan memperhatikan cash inflow dan ketersediaan uang kas di kas daerah. Kerja sama dan hubungan yang harmonis antar kepala SKPD dan SKPKD dalam menyusun anggaran kas akan memberikan kontribusi positif atas terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan tidak lagi terdengar keluhan dari masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum pelayanan dasar yang terlambat dengan alasan dana belum tersedia dan belum dapat dicairkan.

(3) Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui. Dokumen perda tentang APBD memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tersebut merupakan implementasi dan pelaksanaan atas urusan pemerintahan yang telah diserahkan dari pusat kepada daerah baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan.

(4) Fungsi Alokasi

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Penyusunan program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD supaya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pada akhirnya secara signifikan akan mengurangi pengangguran di daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya APBD merupakan *government expenditure* pada tingkat lokal, yang secara teoritis akan menciptakan *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi. APBD yang dikelola dan dilaksanakan dengan baik tentu akan mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

(5) Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam kaitan ini, sering terdengar istilah yang dilontarkan para pakar maupun orang awam bahwa APBD adalah uang rakyat. Jika APBD adalah benar uang rakyat, sudah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dalam penerapan fungsi distribusi perancangan APBD harus lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang output-nya dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat output dari proses kegiatan yang didanai dari uang rakyat tersebut.

(6) Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pengimplementasian fungsi stabilisasi dapat melalui kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD. Alokasi anggaran belanja subsidi diberikan kepada lembaga/perusahaan yang memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Subsidi ini pada dasarnya diberikan untuk bantuan biaya produksi pada lembaga/perusahaan. Dengan diberikannya subsidi tersebut keuntungan perusahaan tidak akan berkurang namun harga barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dengan kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD maka daya beli masyarakat akan semakin baik dan penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Unsur-Unsur APBD

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan, meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dimana PAD ini dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan yang terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah.
 - b) Retribusi.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang membiayai kebutuhan daerah. Adapun dana perimbangan terdiri atas :
- a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
 - b) Dana Alokasi Umum.
 - c) Dana Alokasi khusus.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a) Dana Darurat.
 - b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
 - c) Dana Penyesuaian.
 - d) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya.
 - e) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya Sugiyono (2009: 53-55) ada tiga jenis yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Kota Palembang dilakukan berdasarkan metode *Value For Money*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Jalan Merdeka No. 1 Telepon (0711) 352282 Faximile (0711) 372384 Kode pos 301321

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengukuran kinerja berdasarkan <i>Value for Money</i> .	Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada ekonomis, efisien, efektivitas dan <i>outcome</i> .	a. Ekonomis b. Efisiensi c. Efektivitas d. <i>Outcome</i>

Sumber : Penulis, 2016

D. Data Yang Diperlukan

Husein Umar (2011: 42) data penelitian pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, dalam hal ini berupa hasil observasi dan wawancara yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti melalui suatu informasi yang sudah jadi berupa publikasi atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lain.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Dimana data primer dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2012-2015. APBD tersebut diperoleh dari instansi terkait, dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah Kota Palembang, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa referensi penelitian sebelumnya dan berbagai buku pedoman.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:194) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari :

1) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian secara cermat dan sistematis.

2) Survey

Survey adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk menerima tanggapan dari responden tentang sampel.

3) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

4) Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam kalimat tanya, dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

5) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan staf di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diambil secara tertulis terutama berupa dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang pada tahun 2012-2015.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data

Mudrajat (2009:145) menyatakan bahwa metode analisis data terdiri dari dua jenis yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realisasi atau *natural setting* yang hipotesis, kompleks dan rinci.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah analisis yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu menjelaskan hasil dari perhitungan kinerja dengan menggunakan *Value For Money* dengan menggunakan indikator ekonomis, efisiensi, efektivitas dan *outcome*.

Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka perhitungan dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dengan menghitung dan menyajikan kinerja keuangan pemerintah Kota Palembang dengan menggunakan metode *Value for money*.

2) Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif dan kuantitatif yang menyajikan data dan menghitung kinerja

dengan metode *Value For Money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2016)

a) Ekonomis

$$\mathbf{EKONOMIS} = \frac{\mathbf{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA}}{\mathbf{TARGET\ ANGGARAN\ BELANJA}} \times \mathbf{100\%}$$

b) Efisiensi

$$\mathbf{EFISIENSI} = \frac{\mathbf{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA}}{\mathbf{REALISASI\ ANGGARAN\ PENDAPATAN}} \times \mathbf{100\%}$$

c) Efektivitas

$$\mathbf{EFEKTIVITAS} = \frac{\mathbf{REALISASI\ ANGGARAN\ PENDAPATAN}}{\mathbf{TARGET\ ANGGARAN\ PENDAPATAN}} \times \mathbf{100\%}$$

d) *Outcome*

Tingkat pencapaian dari program yang telah dilaksanakan dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-SKPD Sekretariat Daerah. Sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, bahwa walikota melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada BPKAD yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan dibidang pendapatan dan aset sebagai koordinasi dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah yang utuh dan lengkap.

Kota Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. Sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang dituntut untuk melakukan suatu penataan dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang perlu dibentuk sebagai Perangkat Teknis

Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang dibentuk sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang no. 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Palembang no. 10 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota Palembang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang mempunyai visi dan misi, yaitu :

a. Visi :

Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana perimbangan yang transparan, adil, proporsional, dan demokratis.

- 2) Mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengkajian, supervisi, dan evaluasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang konstruktif, adil, dan selaras dengan kebijakan perpajakan nasional.
- 3) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- 4) Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditoleril.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

a. Struktur Organisasi

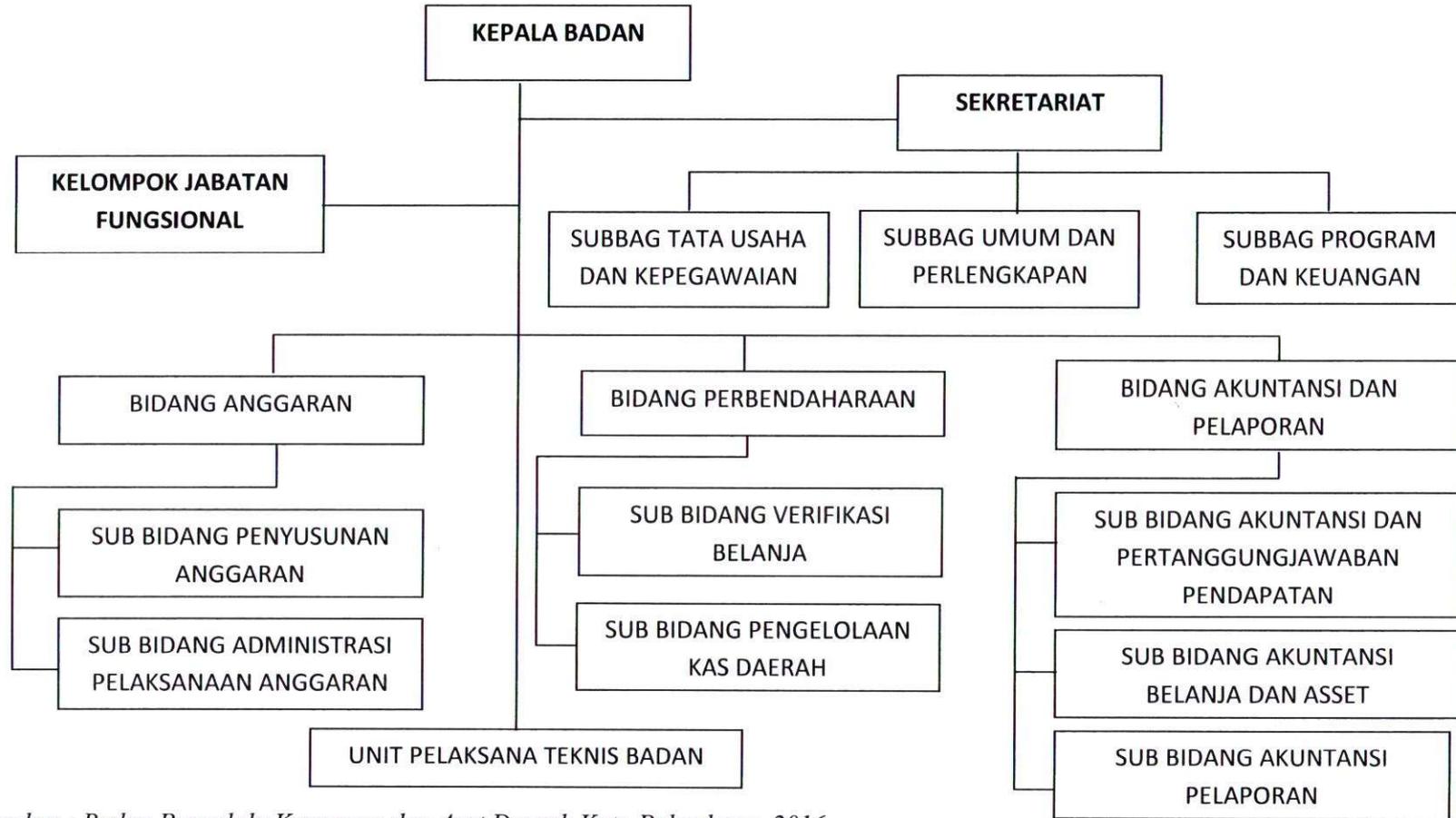
Struktur organisasi merupakan acuan bagi semua pegawai yang terhimpun dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan pekerjaan yang tersedia. Pegawai akan mengetahui apa yang akan dikerjakan dan dari siapa pekerjaan tersebut diterima serta kepada siapa pekerjaan itu dipertanggungjawabkan. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub bagian umum dan perlengkapan
 - b) Sub bagian program keuangan
 - c) Sub bagian tata usaha dan kepegawaian
- 3) Bidang anggaran, terdiri dari:
 - a) Sub bidang perencanaan anggaran
 - b) Sub bidang pengendalian pelaksanaan anggaran
- 4) Bidang perbendaharaan, terdiri dari:
 - (1) Sub bidang pengelolaan Kas Daerah
 - (2) Sub bidang Verifikasi dan belanja pegawai
- 5) Bidang Akutansi dan pelaporan, terdiri atas:
 - a) Sub bidang akutansi dan pertanggungjawaban pendapatan
 - b) Sub bidang akutansi belanja dan asset
 - c) Sub bidang pelaporan
- 6) Jabatan fungsional lainnya

a. Gambar Struktur Organisasi

Gambar IV. 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PAEMBANG



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, 2016

b. Pembagian Tugas dan Wewenang

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Tugas :

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi :

- a) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas badan.
- b) Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah.
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- d) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- e) Penatausahaan keuangan daerah.
- f) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g) Melaksanakan fungsi BUD, yang terdiri atas :
- h) Melaksanakan tugas dan fungsi selaku kepala SKPD dan selaku pengguna Anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya.

- i) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

2) Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan.
- c) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian sekretariat terdiri dari :

- a) Sub bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bag umum dan perlengkapan.

- (2) Menyelenggarakan pelayanan kebutuhan umum.
 - (3) Menginventaris, mengelola, mendistribusikan dan memelihara serta mengamankan perlengkapan dan peralatan kantor.
 - (4) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - (5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal.
 - (6) Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit untuk mendukung pelaksanaan tugas.
 - (7) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (8) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
 - (9) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
 - (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub bagian program dan Keuangan, mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja sub bagian program dan keuangan.
 - (2) Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan.
 - (3) Menyusun DPA/DPPA dan anggaran kas badan.
 - (4) Meneliti kelengkapan SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran.

- (5) Menyiapkan SPM dan melakukan verifikasi SPJ belanja badan.
 - (6) Melaksanakan penatausahaan keuangan badan.
 - (7) Mengkoordinir pengelolaan belanja hibah dan bantuan.
 - (8) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (9) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
 - (10) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
 - (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Sub Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian.
 - (2) Melaksanakan pelayanan administrasi dan arsip kepegawaian.
 - (3) Menyelenggarakan pelayanan Administrasi surat menyurat, tata usaha kearsipan dan perpustakaan.
 - (4) Mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai permasalahannya agar penyampaian ketujuan tepat waktu.
 - (5) Mengumpulkan dan mengelolah data yang berhubungan dengan kepegawaian.
 - (6) Menyiapkan data dan menyusun rencana daftar urut kepangkatan dan analisis jabatan.

- (7) Menyiapkan dan melakukan pengawasan terhadap daftar kehadiran pegawai badan.
- (8) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (9) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
- (10) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
- (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Anggaran

Tugas :

melaksanakan kegiatan pengkoordinasian perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Fungsi :

- a) Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD.sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- b) Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD.
- c) Verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD.
- d) Penyusunan laporan di bidang anggaran daerah.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

a) Sub bidang Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bidang perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja badan.
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD.
- (3) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
- (4) Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah.
- (5) Menyiapkan petunjuk teknis dan pembinaan dalam penyusunan anggaran SKPD.
- (6) Memberikan bimbingan teknis dalam proses penyusunan anggaran SKPD.
- (7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (8) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (9) Membina dan memotivasi bawahan upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- (10) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
- (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub bidang pengendalian pelaksanaan anggaran, mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran sesuai rencana kerja Badan.
- (2) Menghimpun, menganalisa dan melakukan verifikasi terhadap DPA/DPPA SKPD sebagai pedoman pelaksanaan APBD.
- (3) Menyiapkan surat penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (4) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (5) Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran daerah.
- (6) Melakukan koordinasi dalam rangka pinjaman daerah, penyertaan modal dan pemberian pinjaman daerah.
- (7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (8) Mengawasi pelaksanaan bawahan.
- (9) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- (10) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.

(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Perbendaharaan

Tugas :

Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi verifikasi belanja, administrasi belanja pegawai dan pengelolaan kas daerah.

Fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan, menyiapkan petunjuk teknis serta pembinaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran belanja dan pertanggungjawaban.
- b) Melakukan administrasi, koordinasi dan pembinaan sehubungan dengan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- c) Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai tugas :
 - (1) Penyusunan program kerja dibidang pengelolan kas daerah.
 - (2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya sehubungan dengan pengelolaan kas daerah.

- (3) Penyusunan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan kas daerah.
 - (4) Menyiapkan SP2D.
 - (5) Memeriksa dan mengatur ketersediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
 - (6) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
 - (7) Menyiapkan laporan kas posisi harian, mingguan dan bulanan.
 - (8) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (9) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (10) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
 - (11) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
 - (12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub bidang Verifikasi dan belanja pegawai
- (1) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerja di bidang verifikasi dan belanja gaji pegawai.

- (2) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan administrasi gaji.
- (3) Menyiapkan penerbitan SKPP Gaji PNS.
- (4) Menyiapkan daftar gaji PNS.
- (5) Melaksanakan verifikasi atau pengujian atas pengajuan SPM-UP , SPM-GU, SPM-TU dan SPM LS.
- (6) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD.
- (7) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis tentang tata cara pertanggungjawaban belanja.
- (8) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (9) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- (11) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
- (12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD serta menyajikannya sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi :

- a) Melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- b) Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan daerah.
- c) Menyusun rancangan dan melakukan proses penetapan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pendapatan, mempunyai tugas :
 - (1) Penyusunan rencana dan Program kerja dibidang akuntansi dan pertanggungjawaban pendapatan.
 - (2) Penyusunan kebijakan, pedoman dan akuntansi dan pertanggungjawaban pendapatan SKPD.
 - (3) Melakukan verifikasi, evaluasi dan konsolidasi atas laporan realisasi pendapatan SKPD.

- (4) Menyiapkan bahan guna rekonsiliasi dan pertanggungjawaban pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya yang sah.
 - (5) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan akuntansi pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah.
 - (6) Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi penerimaan kas daerah.
 - (7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (8) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (9) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
 - (10) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
 - (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Aset, mempunyai tugas :
- (1) Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pelaporan keuangan daerah akuntansi belanja dan asset.
 - (2) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan akuntansi belanja dan aset sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

- (3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi atas pengelolaan dan penilaian aset daerah.
 - (4) Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis serta : pembinaan dibidang akuntansi belanja pemerintah daerah dan belanja SKPD.
 - (5) Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi pengeluaran kas daerah dan kewajiban daerah.
 - (6) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (7) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (8) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
 - (9) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
 - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas :
- (1) Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pelaporan keuangan daerah.
 - (2) Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan SKPD.
 - (3) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja.

- (4) Membuat laporan realisasi anggaran secara periodik dan prognosis anggaran.
- (5) Menyiapkan Laporan Keuangan Tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD.
- (6) Menyiapkan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (8) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (9) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- (10) Memberi saran dan pendapat kepada atasan.
- (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2012-2015

Tabel IV.1
Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2012	2.138.560.386.304,75	2.240.761.644.433,74	104,78
2013	2.653.312.493.324,70	2.510.646.255.478,88	94,62
2014	3.082.206.627.931,31	2.929.034.491.604,27	95,3
2015	2.859.503.907.463,85	2.703.544.351.937,46	94,54

Sumber : BPKAD Kota Palembang, 2016

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yaitu pendapatan pada tahun 2012 terealisasi sebesar 104,78% melebihi dari target yang dianggarkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu terealisasi sebesar 94,62%. Selanjutnya di tahun 2014 realisasi pendapatan meningkat, terealisasi sebesar 95,3% dari tahun sebelumnya dan realisasi di tahun 2015 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 94,54%.

Tabel IV. 2
Laporan Anggaran Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2012	2.289.049.724.638,86	2.112.638.103.434,82	92,30
2013	2.858.692.130.178,64	2.636.707.559.383,33	92,2
2014	3.153.733.368.049,39	2.812.465.373.360,45	89,2
2015	3.136.935.520.278,17	2.869.893.611.887,60	91,4

Sumber : BPKAD Kota Palembang, 2016

Berdasarkan tabel IV. 2 menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana belanja pada tahun 2012 terealisasi sebesar 92,30%. sedangkan pada tahun 2013 belanja terealisasi sebesar 92,2%. Selanjutnya di tahun 2014 realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 89,2% dari yang dianggarkan, dan pada tahun 2015 belanja mengalami peningkatan yaitu sebesar 91,4%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas dan *outcome* terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2012-2015 untuk menilai Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Segi Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu Tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dan presentase tingkat pencapaiannya. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat ekonomis. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran ekonomis. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup ekonomis, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang ekonomis. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak ekonomis.

Perhitungan tingkat ekonomis berdasarkan data dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang tahun anggaran 2012-2015.

$$\text{EKONOMIS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat ekonomis anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada tahun anggaran 2012-2015 sebagai berikut :

a. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.112.638.103.434,82}{2.289.049.724.638,86} \times 100\% \\ &= 92,29\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2012 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 92,29 % yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2012 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 2.289.049.724.638,86 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 2.112.638.103.434,82.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.826.819.530.978,86. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.317.513.819.171,62. Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.714.590.149.680,82. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.258.329.877.940,20.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih besar daripada target anggaran belanja yang ditetapkan.

b. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.636.707.559.383,33}{2.858.692.130.178,64} \times 100\% \\ &= 92,23\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 92,23% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2013 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja terealisasi sebesar Rp. 2.636.707.559.383,33 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 2.858.692.130.178,64.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.138.200.073.222,64. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar

Rp. 1.520.138.795.175,70. Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.956.326.634.829,33. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.396.493.396.478,90.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih besar daripada target anggaran belanja yang ditetapkan.

c. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.812.465.373.360,45}{3.153.733.368.049,39} \times 100\% \\ &= 89,18\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 89,18% yang artinya cukup ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu anggaran belanja terealisasi sebesar Rp. 2.812.465.373.360,45 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3.153.733.368.049,39.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.463.347.912.208,84. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.683.348.212.928,35. Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.192.485.631.131,45. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.508.876.064.352,00.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih besar daripada target anggaran belanja yang ditetapkan.

d. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.869.893.611.887,60}{3.136.935.520.278,17} \times 100\% \\ &= 91,49\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

adalah 91,49% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2015 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja terealisasi sebesar Rp. 2.869.893.611.887,60 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3.136.935.520.278,17.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.482.655.909.095,96. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.763.017.153.638,12. Dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.240.060.316.538,66. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1.574.853.513.936,00.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja itu lebih besar daripada target anggaran belanja yang ditetapkan.

Tabel IV. 3
Pengukuran Rasio Ekonomis Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2012 sampai 2015

Tahun	Rasio Ekonomis	Kriteria
2012	92,29%	Ekonomis
2013	92,23%	Ekonomis
2014	89,18%	Cukup Ekonomis
2015	91,49%	Ekonomis

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel IV. 3, perhitungan kinerja menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dikatakan ekonomis karena dari tahun 2012 sampai dengan 2015 tingkat ekonomis berkisar diantara 90% - 100%. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. Ekonomis terkait dengan sejauh mana dapat meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Segi Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efisien. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran kurang efisien. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efisien, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran efisien. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan sangat efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2012-2015.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada tahun anggaran 2012-2015 sebagai berikut :

a. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.112.638.103.434,82}{2.240.761.644.433,74} \times 100\% \\ &= 94,28\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2012 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 94,28% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Palembang.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2012 menunjukkan kinerja yang kurang baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 2.112.638.103.434,82 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 2.240.761.644.433,74 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.243.859.361.631,00. Dan dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.714.590.149.680,82. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.1.258.329.877.940,20.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

b. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.636.707.559.383,33}{2.510.646.255.478,88} \times 100\% \\ &= 105,02\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 105,02% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Palembang.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2013 menunjukkan kinerja yang tidak baik, yaitu realisasi anggaran belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 2.636.707.559.383,33 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 2.510.646.255.478,88 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.456.589.117.957,00. Dan dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.956.326.634.829,33. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.1.396.493.396.478,90.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

c. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.812.465.373.360,45}{2.929.034.491.604,27} \times 100\% \\ &= 96,02\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 96,02% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Palembang.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2014 menunjukkan kinerja yang kurang baik, yaitu realisasi anggaran belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 2.812.465.373.360,45 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 2.929.034.491.604,27 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.094.810.134.822,48. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp.1.545.294.767.722,00. Dan dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.192.485.631.131,45. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.1.508.876.064.352,00.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

d. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.869.893.611.887,60}{2.703.544.351.937,46} \times 100\% \\ &= 106,15\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 106,15% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Palembang.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2015 menunjukkan kinerja yang tidak baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 2.869.893.611.887,60 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 2.703.544.351.937,46 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.956.153.328.507,52. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 1.461.824.825.500,00. Dan dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.240.060.316.538,66.

Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.1.574.853.513.936,00.

Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Tabel IV. 4
Pengukuran Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2012 sampai 2015

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria
2012	94,28%	Kurang Efisien
2013	105,02%	Tidak Efisien
2014	96,02%	Kurang Efisien
2015	106,15%	Tidak Efisien

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel IV. 4, perhitungan kinerja menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi yang tergolong kurang efisien dan tidak efisien.

Penyebab terjadinya ketidakefisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan-pemborosan pada sektor tertentu, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja barang yang setiap tahun terus mengalami kenaikan, kemudian

penyebab ketidakefisienan anggaran yaitu besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas/kegiatan rapat di luar kantor dan pengadaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan.

Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

3. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Segi Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efektif. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran efektif. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efektif, dan hasil antara

60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang efektif. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efektif.

Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan data dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2012-2015.

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}}{\text{TARGET ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada tahun anggaran 2012-2015 sebagai berikut :

a. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.240.761.644.433,74}{2.138.560.386.304,75} \times 100\% \\ &= 104,77\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2012 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 104,77% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai sangat efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2012 menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.240.761.644.433,74 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar daripada target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 2.138.560.386.304,76 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.639.056.966.586,38. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 1.243.859.361.631,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.595.334.619.236,90. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 1.191.419.527.233,00.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

b. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.510.646.255.478,88}{2.653.312.493.324,70} \times 100\% \\ &= 94,62\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 94,62% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2013 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.510.646.255.478,88 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hampir mendekati target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 2.653.312.493.324,70 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.872.990.886.907,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 1.456.589.117.957,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2013 sebesar Rp.

2.000.649.240.786,45. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 1.472.373.310.577,45.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

c. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.929.034.491.604,27}{3.082.206.627.931,31} \times 100\% \\ &= 95,03\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 95,03% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2014 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.929.034.491.604,27 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hampir mendekati target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3.082.206.627.931,31 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.094.810.134.822,48. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 1.545.294767.722,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.191.462.270.183,06. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 1.604.205.948.483,06.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

d. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.703.544.351.937,46}{2.859.503.907.463,85} \times 100\% \\ &= 94,54\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah 94,54% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2015 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.703.544.351.937,46 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hampir mendekati target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 2.859.503.907.463,85 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.956.153.328.507,52. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 1.461.824.825.500,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.110.159.299.034,79. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 1.530.002.395.100,00.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan,

dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

Tabel IV. 5
Pengukuran Tingkat Efektivitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2012 sampai 2015

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria
2012	104,77%	Sangat Efektif
2013	94,62%	Efektif
2014	95,03%	Efektif
2015	94,54%	Efektif

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel IV. 5, perhitungan kinerja menggunakan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada tahun 2012 dikategorikan sangat efektif, dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dikategorikan efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang ditetapkan tercapai. Ini dapat dilihat dari terlaksanakannya program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda, peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, penataan kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta manajemen transportasi, Peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih,

pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata.

Berikut adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

Tabel IV. 6
Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang
Tahun 2012 sampai 2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
Rasio Ekonomis	92,29%	92,23%	89,18%	91,49%
Kriteria	Ekonomis	Ekonomis	Cukup Ekonomis	Ekonomis
Tingkat Efisiensi	94,28%	105,02%	96,02%	106,15%
Kriteria	Kurang Efisien	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien
Tingkat Efektivitas	104,77%	94,62%	95,03%	94,54%
Kriteria	Sangat Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Olahan, 2016

Akuntansi sektor publik dapat berperan untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau yang dikenal dengan *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya penghargaan atas setiap rupiah uang publik dengan cara mememanfaatkannya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2012 sampai dengan 2015 berada pada kriteria ekonomis. Kriteria ekonomis menunjukkan kinerja yang baik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Konsep ekonomis terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi.

Hasil pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa kurang efisien dan tidak efisiennya anggaran. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran berkisar diantara 90%-100% dan ada yang lebih dari 100%. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dengan output. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya.

Pengukuran kinerja yang diukur berdasarkan tingkat efektivitas pada tahun 2012 dikatakan sangat efektif, karena pada tahun 2012 tingkat efektivitas lebih dari 100%. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 tergolong efektif dikarenakan hasil perhitungan berkisar diantara 90%-100%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan sudah berjalan baik.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Value For Money* didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2012 sampai dengan 2015 berada pada kriteria ekonomis.

Pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa kurang efisien dan tidak efisiennya anggaran. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran berkisar diantara 90%-100% dan ada yang lebih dari 100%. Pada tingkat efektivitas telah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

4. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Berdasarkan *Outcome*

a. Peran Retrospektif

Peran retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik, atau dapat juga digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program atau proyek yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi melalui seminar kepada masyarakat agar mengerti dan menyadari pentingnya untuk membayar pajak dan

retribusi karena penerimaan pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah.

b. Peran Prosfektif

Peran Prosfektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran *outcome* digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis Retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu dilaksanakan dan metode mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Program yang dapat dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dengan melihat hasil kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan lebih mengurangi realisasi anggaran belanja dibandingkan anggaran pendapatan karena dari perhitungan tingkat efisiensi menunjukkan hasil kurang efisien dan tidak efisiennya anggaran. Dari laporan keuangan memperlihatkan bahwa pengeluaran didominasi belanja pegawai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

Tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dikategorikan ekonomis karena berada pada rasio antara 90%-100%. Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah sudah seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran untuk program/kegiatan yang ingin dicapai.

Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran tahun 2012 dan 2014 berada pada kategori kurang efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan antara 90%-100% sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 dikategorikan tidak efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja belum memenuhi syarat efisien yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.

Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2012 dikategorikan sangat efektif karena tingkat rasio efektivitasnya lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 menunjukkan kategori efektif dikarenakan hasil rasio efektivitas berada diantara 90%-100%. Ini menunjukkan bahwa

program/kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang antara Lain :

1. Dilihat dari tingkat ekonomis, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang diharapkan lebih mampu melakukan penghematan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam mencapai program/kegiatan yang ingin dicapai.
2. Dilihat dari tingkat efisiensi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang harus lebih memperhatikan perencanaan dan pengendalian realisasi anggaran belanja dibandingkan realisasi anggaran pendapatan, karena secara keseluruhan rasio efisiensinya dikategorikan kurang efisien dan tidak efisien.
3. Dilihat dari tingkat efektivitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang untuk tahun-tahun selanjutnya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Bambang, Supomo. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ariel Sharon Sumenge. 2013. *Jurnal EMBA : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Harry, David, dan Inggriani Elim. 2014. *Jurnal EMBA : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi. 2015. *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nazril, Naim. 2013. *Jurnal : Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar. Skripsi Universitas Hasanudin* <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6634>. Diakses tanggal 16 Mei 2016
- Nindy Cahya Feriska. 2014. *Jurnal E-Journal Unesa : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money, Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013*. Universitas Negeri Surabaya.
- Mudrajad. 2009. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka No. 1
Telpon 350006 (FAX : 0711 – 372384) Kode Pos 30131
PALEMBANG

Palembang, 26 Juni 2016

Kepada

Nomor : 1244/BPKAD/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Surat Keterangan

Yth. Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
di-

PALEMBANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Sri Kurnia
N I M : 222012057
Judul Proposal/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Palembang

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Izin Pengambilan Data mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 untuk bidang pekerjaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan hasil : **Baik**

Demikian disampaikan untuk bahan pengaturan selanjutnya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG,



ZULFAN. AK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP196105181982031001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIA Q A M

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : SRI KURNIA
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012057
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 29-06-1991

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Karang Anyar
Kecamatan : Gandus
Kota/Kabupaten : Palembang
Dinyatakan : Lulus



Mengetahui
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 September 2015
Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.cc.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Sri Kurnia
Place/Date of Birth : Palembang, June 29th 1991
Test Times Taken : +2
Test Date : February, 4th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
Structure Grammar : 43
Reading Comprehension : 44
OVERALL SCORE : 447

Palembang, February, 11th 2016

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 129/TEA FE/LB/UMP/II/2016

129 certificates

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : SRI KURNIA
NIM : 222012057
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Jumat, 22 Juli, 2016

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Sri Kurnia	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 057	KETUA Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	4/3 2016	Darb I S/2 IV			Perbaiki sesuai
2					dengan saran
3					peubahasan di
4					jumlahnya dan
5	5/3 2016	Darb I S/2 IV			Perbaiki lagi
6					peubahasan.
7					
8	6/3 2016	Darb I S/2 IV			Ace layout -
9					Darb 1 x layout
10					
11	8/3 2016	Skrpsi.			Ace 0/2.
12					Ufchas.
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

aih. Dekan

Program Studi :

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA



Biodata Penulis



Nama : Sri Kurnia
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Juni 1991
Alamat : Jalan D. I. Panjaitan Gg. Muawanah No. 31 RT. 21
Rw. 08 Kecamatan. Plaju Kelurahan Plaju Ulu
No. Telepon : 0813-69118575
Status : Mahasiswa

Nama Orang Tua

Ayah : Abdullah Sulaiman
Ibu : Suhainar Ishak
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PT. Pos Indonesia (Persero)
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

TK : TK Taman Indria
Tahun 1997-1998
SD : SD Negeri 320 Palembang
Tahun 1998-2003
SMP : SMP Negeri 30 Palembang
Tahun 2003-2006
SMA : SMA Negeri 8 Palembang
Tahun 2006-2009